



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 864/V/2015

IV/MEI 2015



DPR Buka Partisipasi Publik Bagi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

DPR Buka Partisipasi Publik Bagi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi



Ketua DPR membubuhkan pernyataan dan tanda tangan pada peresmian Alun-alun Demokrasi

Terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun Alun-alun Demokrasi, mulai hari ini, Kamis (21/05) Dewan membuka partisipasi publik bagi pembangunan Alun-alun Demokrasi.

Acara pembukaan partisipasi publik bagi pembangunan Alun-alun Demokrasi ini diresmikan Ketua DPR RI Setya Novanto di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Turut hadir bersama Ketua DPR, Ketua Tim Implementasi Refomasi DPR yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Pimpinan BURT DPR Roem

Kono, dan Agung Budi Santoso, dan Anggota DPR Taufikulhadi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dalam laporannya menyatakan bahwa sebagai unsur pendukung, Sekretariat Jenderal memfollow-up target-target kinerja Dewan sebagai parlemen modern dengan mendiskusikan bersama pakar-pakar dan tim kerja yang sudah dibentuk, dan juga bersama konsultan yang sekarang sedang mengerjakan *assesment* untuk audit kondisi *existing* dan menyusun program-program kebutuhan dari ruangan-ruangan yang ada.

“Langkah pertama bagi perwujudan

tersebut adalah DPR ingin menyediakan fasilitas publik yang merupakan alun-alun demokrasi sebagai ruang komunikasi dan interaksi warga negara agar bebas dalam menyatakan sikap dan aspirasinya kepada wakil rakyat yang ada di DPR,” terang Win.

Oleh karena itu, alun-alun demokrasi diharapkan menjadi tempat untuk mengekspresikan diri secara bebas dan terbuka untuk semua elemen masyarakat bagi pembangunan bangsa dan negara.

“DPR modern adalah DPR yang dekat dengan rakyat, mendengar dan menampung aspirasi dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena menjadi area publik, maka pagi ini DPR membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, ide dan gagasan konsep dan bentuk serta format seperti apa sebetulnya area publik yang diharapkan ini,” papar Win.

Alun-alun Demokrasi yang direncanakan ini, tutur Win, juga diharapkan akan menjadi ruang untuk masyarakat dalam melancarkan demonstrasi dan menyuarakan aspirasinya, sekaligus juga menjadi tempat yang dapat digunakan untuk mendiskusikan berbagai program dan pemikiran antara DPR dengan masyarakat.

“Untuk mendukung itu semua tentu harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana. Semuanya masih dalam proses pematangan bersama kami tim kerja dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya. Mudah-mudahan segera ada hasil untuk kami laporkan berikutnya,” pungkaskan Win. (sc) foto: andri/parle/od

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Effendi | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Pameran Keris Momentum Kebangkitan Bangsa



Ketua DPR RI Setya Novanto menyaksikan Pameran Keris di DPR

Ketua DPR RI mengapresiasi terselenggaranya pameran Keris Nusantara yang digagas Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Ia berharap Pameran yang mengambil tema 'Keris Nusantara Sebagai Simbol Kebangkitan Bangsa' itu benar-benar menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia secara

keseluruhan.

Acara yang dimulai dengan pemutaran film dokumenter tentang keris nusantara itu dilanjutkan dengan penggungtingan rangkaian bunga tanda dibukanya pameran keris yang akan digelar selama lima hari itu.

Usai penggungtingan rangkaian bunga, Novanto berkeliling melihat koleksi keris yang dipamerkan. Raut wajah kagum terlihat dari diri Ketua DPR RI tatkala melihat satu persatu keris dengan berbagai bentuk yang unik dan usia yang sudah berabad-abad tahun ini.

Langkah politisi dari Fraksi Golkar itu sampai kepada koleksi keris milik Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun yang cukup menarik perhatian adalah Golok Besar koleksi Tjahjo.

Golok yang terukir ayat suci Al Quran ini memiliki pegangan yang terbuat dari tanduk domba.

"Pasti karena punya keris ini, dia bisa jadi menteri," canda Novanto saat melihat keris Tjahjo Kumolo yang disambut tawa pengunjung yang hadir.

Lebih lanjut Novanto berharap pameran ini akan semakin menambah kecintaan masyarakat akan kebudayaan bangsa sendiri yang merupakan warisan bangsa. (Ayu) foto: eka hinda/parle/jod

Pameran Keris Dekatkan DPR Dengan Masyarakat

Keris merupakan kebudayaan, warisan asli bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan. Oleh karena itulah dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) DPR menggelar Pameran Keris Nusantara. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat pembukaan Pameran Keris Nusantara, Rabu (20/5) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

Selain itu ditambahkan Fadli, melalui pameran ini, DPR ingin memberi akses yang lebih besar bagi masyarakat agar lebih dekat dengan DPR. Dan bukan tidak mungkin ke depan DPR juga akan menggelar pameran kebudayaan lainnya seperti pameran batik ataupun pameran batu akik.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, selama ini Keris identik dengan hal magis. Namun sebenarnya hal itu tidak seutuhnya benar. Keris tidak hanya sebagai senjata, tetapi juga perpaduan seni, pahat, ukir dan identik dengan budaya tokoh Indonesia.

"Kalau kita lihat, mulai dari Bung



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperlhatikan koleksi kerisnya

Karno, kemudian Bung Hatta, Pangeran Diponegoro dan hampir semua pemimpin Indonesia memiliki keris," ungkapnya.

Fadli sendiri memiliki sekitar 1200 an keris, namun khusus untuk pameran Keris ini Fadli hanya mengeluarkan beberapa koleksinya. Salah satu yang

paling dibanggakan adalah keris Singosari. Keris ini dapat dikatakan keris yang paling tua, yakni dari abad ke-11. Keistimewaan keris tersebut menurut Kurator pameran, Basuki Teguh Yuwono salah satunya adalah kelangkaannya

“Dalam dunia perkerisan, tangguh

Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak, keris-keris ini kemungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu. Yang menarik dari keris Singosari ini adalah detailnya yang sempurna,” ucap Basuki.

Selain koleksi dari Fadli Zon *Library* dalam pameran yang digelar hingga

hari Minggu (24/5) mendatang ini juga dipamerkan sejumlah keris lainnya koleksi beberapa tokoh Indonesia. Sebut saja koleksi Anggota DPR Fraksi PKB Lukman Edy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta koleksi Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution. (Ayu)

DPR Ingin UU Pilkada Direvisi



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu bahasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Konsultasi bersama Presiden Joko Widodo, Senin (18/5).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai pertemuan tersebut menjelaskan, Pimpinan DPR RI sependapat dengan Komisi II DPR agar UU tentang Pilkada direvisi. Konsen utamanya adalah tidak boleh ada kecenderungan yang menyebabkan

pilkada disengketakan.

Maka menurutnya, harus dicarikan jalan keluar agar semua peserta pilkada langsung tahap I sebanyak 286 daerah ini, harus sepakat dan kompak dari awal. “Kalau nggak kompak dari awal nanti ujungnya bisa menimbulkan masalah,” kata Fahri.

Itulah sebabnya Pimpinan Dewan lebih cenderung dengan hasil kesepakatan awal di Komisi II DPR agar dilakukan amandemen kembali terhadap UU tentang Pilkada. “Pelaksanaan Pilkada melibatkan semua *stakeholder* peserta dan penyelenggara tentunya Pemerintah. Kalau kedua-duanya sepakat tentunya baik, namun harus melampaui prosedur yang dibenarkan oleh UU,” jelasnya.

Selain itu, terkait status peserta, menurutnya salah satu hal yang paling penting, karena belum jelas ditetapkan dalam UU yang lama. Seperti yang dirasakan Partai Golkar dan PPP, saat ini. Sehingga kepersertaan Pilkada langsung bisa jelas.

Dia optimis amandemen ini bisa segera selesai, karena drafnya sudah disetujui. Seperti yang terjadi pada UU tentang MD3 selesai dalam waktu 1 minggu, atau UU tentang Pilkada selesai 2 minggu.

“Ada cara membuat UU yang cepat selesai. Tidak perlu berbelit-belit seperti pakai studi banding keluar negeri. Study banding sudah kita akhiri, nggak ada lagi di DPR. Makanya UU harus cepat selesai, kalau diperlukan study yang lebih mendalam lagi, tolong semua mem-*briefing* pembuatan UU supaya cepat,” tegas Fahri Hamzah. (as) foto: andri/parle/od

Revisi UU Agar Pilkada Efektif dan Efisien

Revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Konsultasi bersama Presiden Joko Widodo, Senin (28/5), di Istana Negara, Jakarta.

Ketua Komisi II DPR bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi,

Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan pengajuan revisi Undang-undang dimaksudkan agar pilkada dapat berlangsung efisien dan efektif, serta terlaksana dengan lancar.

Menurut Rambe, adanya revisi terbatas terhadap UU tentang Pilkada, tidak mengganggu jadwal penyelenggaraan pilkada yang ada.



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman

“Kami (Komisi II) meminta agar Pilkada dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Jadi azas Pilkada serentak ini harus dimasukkan dalam revisi UU tentang Pilkada. Yang kedua, azas penyelenggara pemilu, dan beberapa yang harus di revisi,” paparnya.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, menjelaskan banyak hal yang sudah disampaikan, cacatannya akan menjadi pertimbangan dalam proses untuk menyongsong Pilkada serentak. Selanjutnya, DPR mengharapkan Presiden

untuk menindaklanjuti pasca rapat konsultasi ini.

“Kita berikan kesempatan kepada Pemerintah (Presiden) untuk menampung aspirasi dari anggota Komisi II DPR. Kemudian kita tunggu saja kebijakan dari Presiden, pertimbangan politiknya seperti apa,” kata Taufik.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menjelaskan bahwa dasar Pemerintah terkait dengan Pilkada, adalah masukan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana pilkada sepempak. Sedang-

kan, hal-hal yang berkaitan dengan partai, ada mekanisme UU yang amanatkan ada proses pengadilan.

Menurut Tjahyo, kalau dibuka kesempatan revisi terhadap UU tentang Pilkada, pastinya akan merembet pada pasal-pasal lainnya, ini yang dikhawatirkan KPU sebab akan mengganggu tahapan-tahapan pilkada.

“Terkait Pilkada serentak, konsentrasi Pemerintah tinggal anggaran pilkada yang tercukupi,” ungkapnya. (as) foto: andri/parle/od

DPR Akan Gelar Raker Bersama Bahas *Outsourcing*



Rapat bersama Komisi IX dan Komisi VI DPR membahas outsourcing di BUMN

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan dan Wakil Ketua Komisi IX, Ermalena berjanji akan segera menggelar rapat kerja bersama (gabungan) dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN, guna membahas permasalahan *Outsourcing* (OS) yang ada di tubuh BUMN.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat audiensi DPR dengan Gerakan Buruh/Pekerja (Geber) BUMN, Selasa (19/5) di ruang rapat pimpinan DPR, Senayan Jakarta.

“Ini sejatinya bukan hal baru, sejak 2013 teman-teman buruh dan pekerja BUMN ini memperjuangkan nasibnya,” ungkap Fadli zon.

Dijelaskan Fadli, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan BUMN

kepada para pekerja diantaranya belum mengangkat pekerja *outsourcing* BUMN yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Padahal berdasarkan rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada BUMN untuk mengangkat pekerja OS menjadi karyawan tetap BUMN tersebut. Namun rekomendasi itu hingga kini belum juga dilakukan.

Tidak hanya itu, sebagaimana yang diungkapkan Achmad Ismail atau Ais dari Geber BUMN, BUMN juga belum mempekerjakan kembali sekitar 2977 pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh BUMN. Bahkan BUMN juga belum membayar hak-hak normatif pekerja yang sudah dihentikannya.

Pada kesempatan itu, DPR selain

akan memanggil Menteri Tenaga kerja dan Menteri BUMN guna menggelar rapat kerja bersama, dikatakan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena juga meminta Geber BUMN untuk membuat sebuah kronologis permasalahan OS ini seperti data-data dan fakta yang terjadi selama ini.

“Komisi IX ingin ini segera diselesaikan, ini kepedulian kita bersama dan akan menjadi catatan sejarah dimana negara harus ada di berbagai permasalahan termasuk masalah tenaga kerja yang tidak hanya terkait nasib 2977 pekerja saja, melainkan juga ribuan keluarganya. Oleh karenanya OS harus dihapuskan,” ungkap Ermalena.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan mengatakan OS belum seutuhnya bisa dihapuskan karena hal tersebut masih tercantum dalam UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Namun ia menegaskan bahwa Komisi VI akan mengubah UU No.19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha, dimana BUMN harus mendapat perlakuan khusus karena memang miliki Negara. Dengan diamandemen UU tersebut, diharapkan akan menjadi angin segar bagi para pekerja BUMN, dimana di dalamnya juga akan mengatur tentang pekerja atau buruh BUMN.

“OS belum dapat dihilangkan karena memang masih tercantum dalam Undang-undang. Namun disini kami tengah memperjuangkan dan masuk dalam prolegnas 2015 untuk mengubah (amandemen) UU NO.19 tahun 2013 tentang Badan Usaha, yang diharapkan dalam UU tersebut juga mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan BUMN,” papar Heri seraya berjanji akan ikut memfasilitasi digelarnya rapat kerja bersama atau gabungan. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/od

Pemerintah Harus Antisipasi Pelambatan Ekonomi



Pidato Ketua DPR RI Setya Novanto pada pembukaan Rapat Paripurna

Ketua DPR RI Setya Novanto menyerukan pemerintah untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan ekonomi

nasional. Bila pemerintah lambat merespon realitas ini, kinerja ekonomi akan terganggu.

Demikian dikemukakannya saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (18/5). “Pimpinan DPR mengingatkan kepada pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan perlambatan ekonomi ini. Apabila pemerintah tidak merespon dengan cepat kemungkinan besar akan sulit untuk mengembalikan performa atau kinerja ekonomi yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.”

Saat ini, kata Novanto, keluhan masyarakat begitu banyak, terutama seputar daya belinya yang terus merosot. Semua ini karena harga kebutuhan bahan-bahan pokok terus melejit naik. Apalagi, menjelang datangnya Ramadan dan Idul Fitri biasanya bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat pasti naik.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen di triwulan empat. Itu berarti melemah dibanding triwulan tiga tahun yang sama sebesar 5,01 persen. Ini semua karena belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Ekspor pun mengalami kontraksi. Apalagi, investasi yang masuk juga relatif rendah. (mh) foto: naefuroji/parle/jod

Pemerintah Ajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2016

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran 2016 mencapai 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2015, namun sedikit lebih rendah dari target awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam Rapat Paripurna DPR, ketika menyampaikan pengantar dan keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran, di Gedung Nusantara II, Rabu (20/05/15). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korekku, Taufik Kurniawan.

“Pencapaian pertumbuhan tersebut akan lebih bertumpu pada faktor-faktor dalam negeri. Kegiatan dan aktifitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan akan menjadi pendorong utama per-



Menkeu saat memberikan Laporan Pengantar Kerangka Ekonomi Makro kepada Pimpinan DPR

tumbuhan ekonomi yang lebih tersebar dan terfokus pada pengembangan potensi daerah,” jelas Bambang.

Sementara itu, lanjut Bambang, laju inflasi diperkirakan pada kisaran 4,0 persen \pm 1,0 persen, terutama didukung

oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Sedangkan, untuk nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 12.800-13.200 per dolar Amerika Serikat.



“Meskipun masih terdapat berbagai resiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2016, namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya alokasi dana infrastruktur serta komitmen Pemerintah dalam pembiayaan dan inisiatif pembangunan, diharapkan dapat menjadi insentif baru arus investasi asing ke Indonesia,” jelas Menteri yang pernah menjabat Wakil Menkeu itu.

Asumsi dasar ekonomi makro berikutnya yang diajukan Pemerintah meliputi suku bunga SPN 3 bulan pada 2016 diperkirakan berkisar 4,0-6,0 persen,

dan rata-rata harga minyak 60-80 dolar AS per barel. Sedangkan, *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 1.930-2.050 ribu barel setara minyak per hari, yang terdiri dari *lifting* minyak bumi sekitar 830-850 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.100-1.200 ribu barel setara minyak per hari.

“Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Perkembangan kinerja global yang kurang menguntungkan tersebut telah

berdampak cukup nyata pada perekonomian global,” jelas Bambang.

Meskipun dinamika perekonomian dewasa ini, imbuh Bambang, menunjukkan tantangan dan resiko yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, namun Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus bekerja keras agar derajat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Menanggapi pengajuan dari Pemerintah ini, Taufik meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menyiapkan pandangan fraksi, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna, 26 Mei 2015 mendatang. (sf) foto: iwan armanias/parle



Anggota DPR Sungkono

Anggota DPR Sungkono dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, dalam APBN Perubahan 2015 lalu telah dianggarkan untuk bantuan talangan korban lumpur Sidoarjo. Bantuan yang dianggarkan ternyata tidak memenuhi untuk semua korban

Segera Selesaikan Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo

lumpur.

Hal itu diungkapkan Sungkono di sela-sela Rapat Paripurna DPR Rabu (20/5) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan agenda Penyampaian Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016.

Karena itu, menurut anggota Dewan asal Dapil Jatim I ini, melalui Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan mengharapkan tidak lagi menyisakan kekurangan dalam rangka penyelesaian ganti rugi korban lumpur Sidoarjo.

“Kami melihat hampir 9 tahun berjalan dan sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pemerintah harus bertanggungjawab

dan hadir dalam persoalan ini. Tidak bisa persoalan ini dibiarkan dan menjadi korban kebijakan pemerintah yang mengabaikan masyarakat korban lumpur Lapindo,” tegas Sungkono.

Dalam forum Rapat Paripurna ini pihaknya meminta dengan sungguh-sungguh supaya apa yang diputuskan dalam Rapat Komisi XI DPR dengan Pemerintah benar-benar dianggarkan pada tahun 2016 yang akan datang, sehingga korban lumpur Sidoarjo mendapatkan kepastian.

“Dengan demikian korban Lapindo ada rasa tenang. Persoalan ini jangan dibiarkan, sebab korban lumpur ini tidak bersalah. Justru kalau negara tidak hadir, maka pemerintahlah yang melanggar HAM,” pungkas legislator asal Sidoarjo ini. (mp) foto: dok/parle

Menteri KP Diminta Laporkan Kepada KPK Soal Isu Suap

Menanggapi *statement* Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai adanya oknum yang akan memberikan 5 Triliun Rupiah kepada Susi apabila dirinya mundur dari Kabinet, Anggota DPR Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng II meminta Susi segera melaporkan KPK jika ada seseorang yang ingin menyuapnya agar turun dari posisi Menteri.

“Kalau ada *statement* akan menyuap dirinya agar turun harusnya laporkan kepada KPK siapa saja yang ingin menyuapnya,” ujar anggota dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jangan sampai ini terkesan hanya *statement* pribadi karena munculnya isu *reshuffle* di kabinet Jokowi. “Ini jangan sampai terkesan mengelabui karena memang ada isu *resufle* kabinet,” tandasnya.



Anggota DPR Firman Soebagyo

Dia mengaku tidak setuju terhadap Peraturan menteri yang mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa melaut dan mencari nafkah. "Ini disebabkan peraturan Menteri yang tidak jelas ujung pangkalnya, jadi saya meminta Pimpinan DPR menegaskan kepada

Presiden bahwa menteri harus pro rakyat bukan pro kelompok semata," jelasnya.

Belum lama ini, melalui twiternya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.

Permintaan tersebut disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter yang terverifikasi miliknya yakni @susipudjiastuti. (Sugeng)

Foto: naefuroji/parle/od

Usulan Pembangunan Dapil Akan Dibahas Rapat Paripurna

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, terhadap siklus waktu pelaksanaan hak mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil) pada APBN Tahun 2016, pengusulannya melalui rapat paripurna pada awal bulan Juni 2015.

Setelah itu, pembahasannya di Komisi pada bulan Juni-Juli 2015 untuk diintegrasikan dalam program pembangunan Pemerintah yang selanjutnya dilakukan didalam pembahasan APBN Tahun 2016 pada bulan Agustus-Oktober 2015.

Hal itu dikemukakannya saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2014/15 di depan Sidang Paripurna, Senin (18/5).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, membahas RAPBN Tahun 2016 diawali dengan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. RKP Tahun 2016



Ketua DPR Setya Novanto

merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019, dimana pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2016 menyusun program prioritas pemerintah yang

akan dijabarkan oleh Kementerian/Lembaga dalam menyusun RKA-K/L.

Pimpinan DPR berharap agar pembahasan di tingkat Komisi lebih diintensifkan dengan melibatkan para ahli dan masyarakat sehingga aspirasi dapat ditampung. Hal ini menjadi penting agar APBN Tahun 2016 dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

DPR akan melakukan pembahasan atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2015. Dalam kaitan tersebut, DPR mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan struktur organisasi kementerian/lembaga agar mempercepat penyerapan anggaran. Di samping itu, DPR akan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. (mp) foto: iwan armanias/parle/od

DPR Sayangkan Maluku Tidak Masuk Program Tol Laut Jokowi

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends menyayangkan sikap pemerintah saat menetapkan program tol laut Jokowi yang tidak memasukkan wilayah Maluku sebagai bagian yang terintegrasi dari program tol laut itu.

"Sangat disayangkan tidak memasukkan Maluku padahal potensinya terbesar di Indonesia jadi jangan hanya dijadikan feeder saja padahal sekitar 3000 kapal nelayan beroperasi di Maluku,"terangnya saat interupsi pada sidang Pidato Pembukaan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Senin, (18/5).

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan, terdiri atas pelabuhan

internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

Namun hanya pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru, sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan. Dari 24 pelabuhan itu nantinya dibagi menjadi dua hub internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi 'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari



Anggota DPR Mercy Chriesty Barends

berbagai negara. Pemerintah juga menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10.000 TeUS, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. (Si) foto: naefuroji/parle/od

Perlu Ditetapkan Hari Legislasi

Pimpinan DPR mengajak para anggota Dewan untuk kembali menyepakati dan menetapkan adanya hari-hari legislasi dalam setiap minggu, agar kita dapat memenuhi target penyelesaian legislasi yang sudah menjadi komitmen bersama.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPR Setya Novanto saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2014/2015 di depan Sidang Paripurna DPR Senin (18/5).

Didampingi empat Wakil Ketua DPR, Setya Novanto lebih lanjut menghimbau komitmen seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk bekerja keras menyelesaikan target legislasi yang telah disepakati.

“Publik tidak mau tahu jika capaian legislasi rendah, maka seluruh lembaga terkena dampak buruknya,” tegas dia. Untuk menyelesaikan tar-

get legislasi yang ditetapkan dalam Prolegnas, tidak semata-mata merupakan tanggung jawab DPR, tetapi juga Pemerintah. Oleh karena itu DPR dan Pemerintah harus bekerja sama secara optimal juga melibatkan DPD sesuai kewenangannya.

Selain itu, Setya Novanto menegaskan bahwa dalam kedudukannya, Pimpinan DPR berperan sebagai *speaker*, bukan sebagai kepala organisasi yang dapat memerintah bawahannya. Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan DPR, bahkan Anggota DPR memiliki posisi yang sama, dan bekerja serta bertanggung jawab kepada konstituen masing-masing.

Untuk itu, Pimpinan DPR mendorong semua komisi untuk segera menyelesaikan RUU yang sudah dalam proses penyusunan di Komisi dan segera disampaikan ke Badan Legislasi untuk



Ketua DPR Setya Novanto

dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi.

RUU yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi yaitu RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk segera diselesaikan dan disetujui sebagai RUU Usul DPR. (mp) foto: iwan armanias/parle/od

Menyatukan Sistem Pendidikan dengan Satu Anggaran



Udin S Winataputra menjadi pembicara bertajuk Strategi Pembangunan Pendidikan

Anggaran pendidikan masih tersebar ke beberapa kementerian penyelenggara pendidikan. Ke depan diharapkan ada penyatuan anggaran, sehingga bisa disusun pula satu sistem kependidikan yang menasional, tidak sektoral lagi.

Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk Strategi Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di DPR RI, Kamis (21/5). Hadir sebagai pembicara tunggal dalam diskusi tersebut Udin S Winataputra, Guru Besar Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Diskusi ini digagas oleh Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR. Hadir juga memberi sambutan pembuka

Deputi Anggaran Setjen DPR Setyanta Nugraha.

Menurut Udin, semua kementerian yang menyelenggarakan pendidikan memang sudah saatnya menyatukan arah pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan begitu ada satu sistem yang terbangun dengan anggaran yang juga tunggal. Ini penting untuk menyeragamkan paradigma dan filosofi pendidikan nasional.

Pada bagian lain, Udin juga memaparkan, problem kurikulum nasional. Katanya, kurikulum nasional masih esensialistik. Artinya, masih lebih mementingkan pada teori ilmu, bukan mementingkan kemaslahatan manusia. Sisi lain kurikulum juga harus memiliki warna kedaerahan. “Kurikulum memang sudah menasional, tapi tidak berdiversifikasi,” jelasnya.

Masing-masing daerah memiliki keunggulan sendiri yang perlu digali dan ditonjolkan dalam dunia pendidikan. Dalam Pasal 1 butir 19 UU No.20/2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar.

Banyak daerah justru tidak mampu menerapkan kurikulum nasional karena keterbatasan anggaran dan nilai-nilai lokal yang belum terakomodasi dengan baik dalam kurikulum nasional. Dari sini terlihat masih ada kesenjangan pendidikan antar-daerah yang perlu dicari akar masalahnya.

(mh) foto: andri/parle/od

Komisi V DPR Desak Pemerintah Percepat Pertumbuhan Infrastruktur Daerah



Anggota Komisi V DPR Roem Kono

Anggota Komisi V DPR Roem Kono menyayangkan kontribusi daerah yang masih minim terkait percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Selama ini pertumbuhan itu tergantung dari pusat misalnya saja pembangunan infrastruktur yang harus dianggarkan dari pusat seharusnya bisa saja dialihkan kepada investor jangan dialokasikan pemerintah saja,” ujarnya kepada Parlemen, Rabu malam, (21/5).

Terkait program tol laut, menurutnya, program itu sudah pernah didengungkan dari dulu namun kendalanya itu banyak sekali dermaga yang tidak berfungsi dan harus dirombak total. “Yang kita perlukan yaitu adanya penyebaran infrastruktur yang baik di seluruh daerah,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar.

Menurutnya, dirinya mendukung digelontorkan anggaran sebesar Rp. 100 Miliar untuk Kabupaten terkait sektor infrastruktur. “Ini masih sangat diperlukan, sementara daerah yang maju sebaiknya jangan diberikan, harus dialihkan kepada daerah yang kurang. Ini baru adanya penyebaran anggaran infrastruktur yang baik,” kata Ketua BURT ini.

Dia menambahkan, Komisi V DPR sangat mengapresiasi positif peran daerah otonom baru yang berjuang membangun daerahnya meskipun anggaran masih minim. “Bupati daerah pemekaran itu merupakan pahlawan daerah bahkan jalan untuk daerah itu bisa mencapai 400 ribu km yang harus diurusin,” tandasnya. (Si) Foto: iwan armanias/parle/od

Sambut Kebangkitan Nasional, Pemerintah diminta Stabilkan Sektor Pangan

Pada hari kebangkitan nasional pertama di era pemerintahan kabinet kerja Jokowi, DPR mengharapkan Pemerintah dapat mengukir sejarah besar dalam menstabilkan sektor pangan dan energi yang dapat berimplikasi pada stabilnya harga-harga bahan pokok.

“Presiden Jokowi harus dapat mengukir sejarah besar pada pengokohan sektor pangan dan energi sehingga tidak ada lagi kegaduhan yang menghinai negara Indonesia,” jelas anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, kepada Parlemen, Kamis, (21/5).

Berubah-ubahnya harga BBM, lanjutnya, membuat semakin merangkaknya Gas LPG dan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta tidak terkendalinya harga beras yang muncul secara bersamaan baru pertama terjadi setelah lengsernya Suharto menjadi presiden.

“Catatan buruk pemerintah sekarang, akan bisa di hapus bila kedepannya, pangan dan energi menjadi mandiri, kuat dalam arti berdaulat pada masa pemerintahan sekarang,” ujar anggota dari Fraksi PKS ini.

Andi Akmal yang juga duduk di Badan Anggaran DPR mengatakan, perbaikan sektor energi dan pangan setiap tahun dievaluasi dan direncanakan baik dalam tata kelola produksi maupun distribusinya.

Namun hingga kini, persoalan pangan dan energi ini terus menghantui pemerintah, ibarat penyakit yang menular kepada masyarakat dengan segala macam kegaduhan mulai dari masalah impor pangan, impor BBM, mahalnya harga beras, naiknya harga BBM, kelangkaan produk pangan dan energi dan banyak persoalan yang berhubungan dengan BBM, Listrik, Gas,



Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin

dan beras.

“Pangan dan Energi ini bagi Indonesia ibarat tajamnya pisau. Jika ia dalam keadaan baik akan memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, jika pangan dan energi ini lagi buruk, maka dengan sangat cepat mampu menggulingkan sebuah pemerintahan dan menyengsarakan seluruh rakyatnya,” katanya.

(Si) foto: rizka/parle/od

PIA DPR Gelar *Talk Show* Waspadai Makanan dan Obat Berbahaya

Prihatin akan maraknya peredaran makanan dan obat serta kosmetik berbahaya, Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar *talkshow* bertajuk Waspadai Makanan dan obat berbahaya, di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (20/5).

“Beredarnya makanan, obat dan kosmetik palsu tentu sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Dari sana kami menilai perlu sebuah edukasi bagaimana sih membedakan produk-produk yang berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karena itu kami mengundang Badan POM (pengawas obat dan makanan),” jelas Ketua Umum PIA DPR RI, Deisti A Novanto.

Deisti menilai saat ini tidak sedikit masyarakat yang terkecoh dengan harga murah, namun ternyata palsu dan berbahaya bagi tubuh. Sebut saja beras plastik yang belakangan diketemukan di sejumlah wilayah. Belum lagi berbagai jenis panganan sehari-hari yang ternyata mengandung formalin. Begitupun dengan obat-obatan palsu yang cukup sulit mengenalinya.

Namun dengan pengarahannya yang disampaikan BPOM, ternyata ada juga cara mudah untuk mengenali produk palsu, selain dari nomer register



Ketua Umum PIA DPR Deisti A Novanto (kedua dari kiri)

produk atau merk dagangnya, diantaranya bisa dengan mengenali warna kemasan dan untuk obat bisa dengan tanda lingkaran serta kotak peringatan yang ada di kemasannya.

“Bahkan untuk mengetahui produk tersebut telah lulus uji oleh BPOM kita juga bisa langsung melihat di website POM (www.pom.go.id) dengan memasukkan nama produk dan merek dagangnya. Ini semua tentu sangat bermanfaat untuk kami, para anggota PIA sendiri maupun karyawan, staf sekjen DPR serta masyarakat umum,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu, selain *talkshow* PIA juga menggelar *beauty class* kerjasama dengan salah satu produk kecantikan ternama yang aman dipakai. Disini anggota PIA dan seluruh undangan yang hadir diajarkan bagaimana merias sesuai dengan karakter wajah dan kepribadian diri. Dengan demikian kecantikan dari dalam (*inner beauty*) akan semakin sempurna dengan adanya kecantikan luar yakni kecantikan wajah (*outer beauty*). (Ayu)

Foto: Rizka/parle/od

Usut Tuntas Pengedar Beras Plastik

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meminta Pemerintah untuk mengusut secara tegas dan tuntas terhadap pelaku pengedar beras plastik karena membahayakan kesehatan masyarakat, yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kios beras tersebut menjual beras plastik dengan harga Rp 8.000 perliter.

Dalam pernyataannya di Gedung DPR Jakarta Rabu, (20/4) Heri menegaskan pemerintah telah lalai dalam mengawasi perizinan kegiatan impor beras yang telah beredar dipasar-pasar tradisional. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi.

Pemalsuan beras plastik ini menjadi

masalah yang cukup serius, karena mencakup kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras plastik di Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah jangan hanya “jago” lempar tanggungjawab. Masyarakat tidak butuh klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai yang paling benar dan paling bertanggungjawab. “Selain tidak memberi solusi apa-apa, saling lempar tanggungjawab dan menyalahkan itu akan semakin meresahkan masyarakat,” tegas Heri.

Masyarakat butuh respon yang so-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

lutif dan koordinasi yang baik antara Kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang dapat menyebabkan kanker.

Harga beras yang saat ini terus naik dan tidak menentu, menurut dia akan

menjadi “pintu masuk” produk berbahaya yang dijual murah. Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli.

Dia menegaskan, bahwa masih lemahnya peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras.

Pemerintah wajib turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung peredaran beras plastik. Selanjutnya, setop impor beras. Karena selain menyebabkan melonjaknya harga beras, hal ini juga dapat menambah kemungkinan membludaknya peredaran beras plastik di masyarakat.

Dikatakan bahwa, beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh peredaran beras plastik, ditutupnya toko pedagang penjual beras yang menjual beras plastik. Padahal sang pedagang

mengaku tidak mengetahui tentang jenis beras yang dijualnya. Akibatnya, omset penjualan para pedagang beras pendapatannya menurun secara drastis.

“Di sini dibutuhkan kepedulian Pemerintah secara nyata, atas langkah dan kebijakan serta pengawasan yang sinergis antar instansi guna mengantisipasi rasa resah gelisah di masyarakat,” kata Heri menambahkan. (spy,mp)

Foto: iwan armanias/parle/od

Dari Masjid Baiturrahman DPR, Menyerukan Kebaikan



Peringatan Isra Miraj di Masjid Baiturrahman DPR RI

Keluarga besar Sekretaris Jenderal MPR, DPR, dan DPD diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Keseimbangan itu akan dapat membangun kekuatan sehingga dapat memberikan dukungan terbaik kepada seluruh anggota dewan walaupun ditengah hiruk pikuk politik.

“Memperingati Isra Miraj ini upaya membangun keseimbangan bagi kita yang bekerja di gedung parlemen. Ini memberikan kekuatan bagi kita se-

hingga tetap bisa bekerja dengan baik di tengah hiruk pikuk politik,” kata Setyanta Nugraha, Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR saat menyampaikan sambutannya di Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/15).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Korpri Unit Setjen MPR/DPR/DPD menghadirkan penceramah Ust. Habib Husen Al-Athas yang juga dikenal sebagai Pembina Radio Silaturrahim. Dalam ceramahnya ia menyebut Masjid

Baiturrahim yang berada di kompleks parlemen memiliki peran sentral bagi siapapun yang berada di sekitarnya.

“Melalui Masjid Baiturrahman mari kita serukan kebaikan kepada siapa saja yang ada di kompleks parlemen ini termasuk kepada wakil rakyat yang berada di gedung tinggi yang tidak jauh dari sini. Mari bangun bangsa, negeri kita, manfaatkan aset bangsa dengan baik, memberi kesejahteraan bagi rakyat kita,” tutur dia.

Ia mengingatkan bangsa Indonesia saat ini harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Dahulu menurutnya Korea ada dibelakang Indonesia, sekarang jauh di depan bahkan Vietnam mulai meninggalkan.

Sekarang yang diperlukan menurutnya adalah kerja sama agar semua potensi bangsa bisa saling membantu meraih keberhasilan. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya yang sangat cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduknya sehingga tidak perlu lagi menjadi TKI di luar negeri.

“Buat apa menyelewengkan jabatan kalau hanya memberikan kesenangan sesaat. Sudah banyak yang menyesali tapi setelah tidak lagi menjadi pejabat, setelah keluar dari gedung rakyat. Penyakit menggerogoti, anak terjerat narkoba. Ingat, mengkhianati amanah maka laknat Allah baginya di dasar api neraka,” tekannya. (iky) Foto: naefuroji/parle/od

8 Doktor pada Upacara Harkitnas di DPR

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 107 di Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai warna

tersendiri. Pasalnya para peneliti dengan latar belakang pendidikan doctoral yang biasanya berkuat dengan

beragam penelitian, mempersiapkan rancangan undang-undang, kali ini diturunkan menjadi petugas pelaksana upacara.

Ada empat peneliti bergelar doktor dan empat kandidat doktor yang bertugas mulai dari tim pengerek bendera, pembaca naskah Pancasila,

Pembukaan UUD 1945, Janji Korpri dan pembacaan doa. Semua rangkaian kegiatan upacara berhasil dilewati dengan sempurna.

“Selamat ya, tugas sudah dilaksanakan dengan baik,” kata Sekjen DPR Winantuningtyas yang sengaja mendatangi seluruh petugas usai pelaksanaan upacara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Sebelumnya dalam upacara Sekjen juga telah membacakan pidato pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informati terkait Harkitnas yang menekankan perjuangan belum usai. Segegap pihak termasuk aparat negara perlu menjaga konsistensi dan kesinambungan perjuangan terutama dalam membangun mental dan karakter bangsa.

Sementara itu Romani Budi Prihatin petugas upacara yang membacakan teks Pancasila mengaku kesempatan tampil dalam Peringatan Harkitnas mempunyai makna tersendiri apalagi ditengah kesibukannya sebagai



Suasana upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 107

peneliti. “Perlu waktu dua hari latihan sampai kita bisa percaya diri untuk tampil,” terangnya.

Ia menambahkan sebagai pegawai Setjen DPR yang bertugas di bidang pengkajian salah satu tugasnya adalah menyiapkan draf rancangan undang-

undang yang menjadi usul inisiatif DPR. “Kita, *supporting system* harus menyampaikan kajian yang terbaik bagi anggota dewan. Target juga jadi perhatian kita, untuk prolegnas 2015 semua draf sudah kita selesaikan,” demikian Budi. (iky) Foto: rizka/parle/od

Setiap Momen Besar Setjen DPR Gelar Donor Darah



Para pegawai sedang mendonorkan darahnya

Acara donor darah yang digelar KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI tetap dipenuhi para pendonor. Para pegawai di lingkungan Setjen DPR berdatangan sejak pukul 08:00. Antusiasme berdonor untuk aksi kemanusiaan tetap

terjaga.

Sampai acara ini ditutup, ada sekitar 200-an pendonor yang mendaftar. Dari jumlah itu, sebagian kecilnya ditolak oleh dokter lantaran HB-nya rendah. Di antara para pendonor itu

ada Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Wakil Sekjen Achmad Djuned. Aksi donor yang digelar Senin (20/5) itu bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta.

Sekjen DPR yang mendaftar sebagai pendonor pagi hari, usai mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional itu, menjelaskan, setiap ada momen hari besar, Setjen DPR selalu menggelar acara donor darah. “Donor darah ini agak sering dilaksanakan untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi, kita tidak hanya sibuk bekerja dari pagi sampai malam, tapi di saat-saat tertentu kita diingatkan harus berbagi,” kata Win, sapaan akrab Sekjen DPR.

Donor darah, lanjut Win, merupakan aksi kemanusiaan yang paling mudah dilakukan. Dengan mendonorkan darah, kesehatan tetap terjaga. Win juga menilai positif antusiasme para pendonor, karena sudah tumbuh kesadaran yang tinggi. Dua manfaat sekaligus didapat saat berdonor, meraih sehat sekaligus bisa melakukan aksi sosial kemanusiaan. (mh) Foto: andri/parle/od

Pemda Jatim Usul UU BUMD Masuk Prolegnas



Wakil Gubernur Jatim Saefullah Yusuf saat pertemuan dengan Tim Sosialisasi Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto

Pemerintah Daerah Jawa Timur (Jatim) mengusulkan kepada Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (UU BUMD) masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saefullah Yusuf saat pertemuan dengan Tim Sosialisasi Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (19/05/2015)

“Kalau ditanya apa yang perlu diundangkan, salah satunya adalah Undang-Undang tentang BUMD. Intinya kita perlu regulasi yang kaitannya dengan BUMD,” kata Saefullah Yusuf.

Ia menyadari dan mengerti bahwa DPR bukannya mudah dalam menghadapi macam-macam aspirasi. “Dari 70 sampai 80% amandeman UUD kita, ada ribuan UU dibawahnya yang masih belum menyesuaikan apalagi peraturan-peraturan dibawahnya. Sementara publik mengharap banyak dari DPR. Kalau baik tidak pernah dipuji, kalau salah paling disalahkan,” ujarnya.

Selanjutnya, Saefullah Yusuf menginformasikan bahwa sering terjadi suatu Undang-Undang sudah ada, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri belum ada, tapi Peraturan Daerahnya (Perda) sudah ada.

“Banyak itu terjadi, termasuk disini. Misalnya Undang-Undang tentang CSR. Dulu UU CSR sudah ada dan PPnya belum keluar tapi Perdanya sudah ada. Demikian juga dengan UU Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin,” terang Guspul

demikian sapaan akrabnya.

“Setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) otomatis Perdanya harus disesuaikan karena kadang sesuai kadang tidak. Ini salah satu problem yang kami hadapi. Sama saja dengan Undang-Undangnya sudah ada namun PP-nya belum ada bahkan ada yang puluhan tahun,” tambanya.

Ia menginformasikan, saat ini pemerintah daerah sedang didorong oleh buruh untuk mengeluarkan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja kaitannya dengan Masyarakat Ekonomis Asia (MEA).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Sosialisasi Baleg DPR Totok Daryanto mengucapkan terima kasih atas usulan yang disampaikan Wakil Gubernur Jatim tersebut.

“Saya kira sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua karena kita mengetahui betapa sebenarnya urusan perundang-undangan ini memang tidak selalu berjalan mulus seperti tata urutannya. Yang harus dimulai dengan UU, PP, Permen, Perda dan sebagainya,” tegas Totok.

“Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya regulasi-regulasi bisa muncul duluan di lapangan,” tambanya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan setiap Perda harus diajukan dulu sebelum diperdakan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan untuk Bupati dan Walikota kepada Gubernur.

“Sehingga disini mestinya ada problem kalau PP-nya belum ada acuannya apa, ini kita belum tahu kok bisa. Menteriya menyeturinya dengan apa. Dengan UU yang baru ini sebetulnya ada jaminan adanya tertib hukum tetapi juga sekaligus menjadi tanda tanya bagi kita kalau ada persoalan-persoalan yang mendesak yang memerlukan regulasi lalu cara mengatasinya itu akan menjadi bahan masukan bagi kita semua di DPR tentunya Komisi II untuk menjadi masukan untuk mengontrol mitra kerjanya (Kementerian Dalam Negeri) bahwa UU Pemda sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi adanya tambal sulam dalam sistem perundang-undangan,” papar politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Menurutnya, tidak boleh muncul tiba-tiba sebuah Perda yang langsung kepada masyarakat tapi tidak ada payung hukumnya. “Mestinya ini tidak bisa,” tandasnya.

Melalui Komisi II, kata Totok, ia akan minta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kinerjanya agar seluruh PP dan turunan-turunan dari setiap produk UU ditangani dengan cepat tidak bisa lagi terlambat kalah dengan peraturan yang berada di bawahnya. (sc) Foto: suciati/parle

Baleg DPR Sosialisasi Prolegnas di Surabaya

Tim Sosialisasi Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi

Nasional Prioritas Tahun 2015 di Surabaya, Jawa Timur.

“Sosialisasi di Jawa Timur ini merupakan daerah keempat yang dikunjungi Tim Sosialisasi Baleg. Sebelumnya Baleg telah melakukan sosialisasi ke Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan,” kata Totok saat pertemuan Tim Sosialisasi Baleg dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan jajarannya beserta Kanwil Hukum dan HAM dan perwakilan dari Universitas Airlangga di Ruang Kertanegara, Kantor Gu-

bernuar Jawa Timur di Surabaya, Selasa (19/05/2015)

Dalam kesempatan tersebut, Totok menjelaskan bahwa Badan Legislasi memiliki tiga tugas utama. Pertama, yaitu menyusun Rancangan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan RUU beserta alasannya untuk lima tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.

Kedua, mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan RUU beserta alasannya untuk lima tahun dan prioritas tahunan antara DPR, pemerintah, dan DPD. Dan ketiga yaitu melakukan sosialisasi program legislasi nasional.

“Tujuan sosialisasi ini tentunya yang pertama adalah untuk mensosialisasikan seluruh RUU yang akan dibuat DPR bersama Pemerintah selama lima tahun kedepan,” terang politisi DPR dari Fraksi PAN ini.

“Kemudian sekaligus tentunya kami akan mendapatkan masukan-masukan, termasuk sebagaimana tadi disampaikan Wagub Jatim mengenai keluarnya Perda sebelum adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri,” tambahnya.

Menurutnya, ini sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua. Karena kita mengetahui betapa sebenarnya urusan perundang-undangan ini memang tidak selalu berjalan mulus seperti tata urutannya. Yangmana harus dimulai dengan UU-nya, kemudian PP, Permen, Perda dan sebagainya.

“Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya regulasi-regulasi bisa muncul duluan di lapangan,” imbuh Anggota Dewan Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa hasil dari proses sosialisasi ini agar dalam setiap RUU yang disusun dan dibahas nantinya, masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan-masukan pada proses pembentukan Undang-Undang.

“Sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil sosialisai juga diharapkan



Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyerahkan cinderamata kepada Wakil Gubernur Jatim

dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 mendatang,” jelas Totok.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saefullah Yusuf menyampaikan sering terjadi Undang-Undang sudah ada, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri belum ada tapi Peraturan Daerahnya sudah keluar.

Dalam pertemuan tersebut, Totok didampingi Tim Sosialisasi Baleg DPR antara lain Saan Mustafa (Wakil Ketua Baleg/F-PD), Agustina Wilujeng Pramestuti dan Abidin Fikri dari Fraksi PDI-P, Ahmad Zacky Siarad (F-PG), Moreno Suprpto dan Azikin Solthan dari F-Gerindra, Syamsul Luthfi (F-PD), Yandri Susanto dan Haerudin dari F-PAN, Abdul Malik Haramain (F-KB), Abdul Hakim (F-PKS), Anas Thahir (F-PP), Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura). (sc) Foto: *suciati/parle*

Dewan Desak Pemerintah Segera Serahkan Draf RUU KKR



Diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR RI

Mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 ini, sebagai inisiatif pemerintah, maka DPR RI mendesak pemerintah untuk

segera menyerahkan draft RUU KKR tersebut untuk segera dibahas dan diselesaikan. Sebab, RUU KKR tersebut penting, agar persoalan HAM masa lalu bisa diselesaikan dan tidak selalu muncul menjadi alat politik menjelang setiap Pilpres. Diharapkan selesai Desember 2015.

“Urgensi RUU KKR ini adalah kejujuran untuk menyelesaikan sejarah kelam HAM masa lalu dan untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi, RUU KKR ini sebagai instrument untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota Baleg DPR RI FPDIP Masinton Pasaribu dalam forum legislasi ‘RUU KKR’ bersama anggota Komisi III DPR RI dan anggota Baleg DPR RI FPPP Arwani Thomafi dan Wakil Koordinator KontraS Krisbiantoro di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/5).

Karena itu kata Masinton, RUU ini bukan untuk balas dendam politik, menghakimi, dan membela kelompok tertentu. Tapi, sesuai TAP MPR RI No.5 tahun 2000, tentang paman-tapan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu agar pelanggaran HAM masa lalu tidak terjadi di masa mendatang. “Se-

mangatnya adalah kejujuran membuka sejarah masa lalu dengan menegakkan kebenaran. Kalau harus dimaafkan pun tetap harus melalui proses peradilan,” ujarnya.

Kenapa dimulai tahun 1965? Kata Masinton, sebab sejak itu pemerintahan Orde Baru (Orba) mulai menyalahgunakan kekuasaan. Sejarah itu harus diproses dengan benar dan adil. Persoalannya apakah nanti divonis bersalah, dimaafkan atau bagaimana tidak masalah, yang penting tuntas. Sehingga ke depan bangsa ini bisa dibangun dengan arif dan dengan cara-cara yang beradab serta tak ada lagi isu-isu HAM setiap Pilpres,” tambahnya.

Diakui Arwani Thomafi, jika RUU KKR sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, draft RUU KKR dari pemerintah saat ini mesti dengan materi yang sama sekali baru pula dan bukan kopi-an dari UU KKR yang dibatalkan MK tersebut. Di mana pertimbangan MK ketika itu antara lain untuk memberi perlindungan kepada keluarga korban dan menjaga kesepahaman semua pihak dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk itu Ketua DPP PPP ini me-

nyambut positif atas inisiatif pemerintah tersebut sebagai RUU prioritas 2015 dan pembentukannya berdasarkan hukum yang kuat yaitu TAP MPR RI. “Yang penting jangan sampai RUU KKR ini memunculkan dan menjadikan salah satu kelompok menjadi tertuduh atau menjadi musuh baru. Juga jangan sampai mengganggu harmoni dan persaudaraan kebangsaan yang sudah dibangun saat ini, tanpa mengesampingkan hukum untuk diselesaikan bersama-sama,” ungkapnya.

KontraS yang telah membaca draft RUU KKR tersebut justru menilai RUU KKR yang baru ini justru lebih lemah dari UU KKR yang dibatalkan oleh MK tersebut, sehingga tidak jelas ujung-pangkalnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM itu sendiri. “Setidaknya ada 15 catatan dalam draft itu yang lemah terkait definisi pelaku, batasan peristiwa, tak ada pemisahan yang tegas antara KKR dan pengadilan HAM, kriteria pelanggaran HAM berat, definisi korban, perbedaan korban militer, korban gempa, korban kemiskinan dan sebagainya,” jelas Krisbiantoro.

Padahal, kalau kasus pelanggaran HAM itu sebagai rekayasa penguasa atau by design, seharusnya ada proses

rehabilitasi bagi korban. Belum lagi masalah amnesty dan restitusi serta tak ada jaminan pelanggaran HAM itu tidak terulang lagi. “KKR pun hanya bersifat rekomendasi, lalu bagaimana kalau tidak dijalankan? Apa cukup hanya dengan pengampunan, yang penting tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi? Ini bahaya,” tutur Krisbiantoro lagi.

Dengan demikian dia meminta DPR harus hati-hati dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu, agar tidak gagal membangun keadilan dalam berbangsa dan bernegara. “Maka semangat RUU KKR ini rekonsiliasi horizontal dulu. Selanjutnya, negara ini harus dibangun di atas kejujuran dan UU KKR ini harus bisa memaksa pelaku dan korban hadir di KKR. Bukan untuk balas dendam, melainkan mengakui sejarah kelam, melalui proses peradilan, dan silakan dimaafkan,” pungkasnya.

Kasus pelanggaran HAM yang harus diproses antara lain G 30 S PKI 1965, Talangsari Lampung 1995, peristiwa ninja yang membunuh kiai-kiai NU di Jawa Timur 1996, Rawagede Belanda 1947, Tanjung Priok Jakarta 1984, tragedy 27 Juli 1996 (PDI), dan lain-lain.(nt)

Komisi I Beri Penghormatan Terakhir Pada Dubes Burhan



Pimpinan Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI menyampaikan rasa duka yang dalam atas meninggalnya Duta Besar Indonesia untuk Pakistan, Burhan Muhammad. Rapat internal komisi yang membidangi masalah luar negeri ini memutuskan mengirim perwakilan untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum yang disemayamkan di Kemenlu RI.

“Iya kita menyampaikan belasungkawa dan tadi dalam rapat internal Komisi I telah diputuskan akan mengirimkan utusan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang disemayamkan di Gedung Pancasila Kemen-

terian Luar Negeri,” kata anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/15).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan pemerintah patut memberikan penghargaan yang pantas kepada Dubes Burhan Muhammad apalagi almarhum gugur pada saat melaksanakan tugas negara.

Dihubungi pada kesempatan berbeda anggota Komisi I DPR RI Evita Nurshanty meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri segera mengklarifikasi tentang peristiwa yang menyebabkan meninggalkan Dubes Burhan dan istrinya. Menurutnya hal ini penting agar tidak menimbulkan simpang siur informasi.

“Kita mendengar informasi kecelakaan jatuhnya helikopter di Pakistan karena mesinnya rusak dan terbakar, ada juga informasi lain terjadi insiden penembakan karena terbang di lokasi konflik. Informasi ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” papar dia.

Pemberitaan media menyebut kecelakaan helikopter terjadi di wilayah Gilgit, Pakistan Jumat (8/5). Akibat kejadian tersebut istri dubes Hery Listyowati meninggal dunia di tempat. Sementara Dubes Burhan mengalami luka bakar serius dan sempat dirawat di General Hospital, Singapura.

(iky) Foto: andri/parle/od



Pemerintah Perlu Ajak Asean Bahas Rohingya



Anggota Komisi I Evita Nursanty

Pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasi dengan negara-negara anggota Asean untuk membicarakan persoalan pengungsi Rohingya yang beberapa waktu terakhir jumlahnya cenderung meningkat. Solidaritas sesama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat menemukan solusi untuk masalah kemanusiaan ini.

“Diperlukan kerja sama Asean untuk membicarakan langkah yang bisa diambil. Ini bukan masalah domestik kita ya tapi masalah negara lain namun secara kemanusiaan perlu kita membangun solidaritas, harus ada solusi untuk masalah ini,” kata anggota Komisi I Evita Nursanty di Jakarta, Selasa (19/5/15).

Politisi Fraksi PDIP ini secara khusus memberikan apresiasi kepada masyarakat terutama nelayan di Provinsi Aceh yang telah bergerak memberikan

bantuan kepada pengungsi Rohingya. Dalam kondisi darurat seperti ini pemerintah perlu memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein Mohi mengatakan Indonesia dalam posisi yang harus siap memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pemerintah Myanmar perlu didesak untuk mengambil langkah agar gelombang pengungsian ini bisa berhenti.

“Myanmar itu kan salah satu anggota Asean jadi berbagai persoalan yang berawal dari konflik antar etnis ini harus dapat diselesaikan dalam forum itu,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo ini.

Untuk mencegah munculnya ma-

salah sosial pemerintah diharapkan dapat segera memfasilitasi pengungsi Rohingya kembali ke negaranya atau ke negara terdekat seperti Bangladesh. Pembicaraan soal ini menurutnya dapat melibatkan organisasi internasional yang lebih besar seperti PBB. (iky) Foto: iwan armanias/parle/od

Indonesia Dorong Perkuat Kerja Sama Maritim dan Kontra Terorisme



Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno

DPR RI menghadiri ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of AIPA tanggal 26 – 27 April 2015 di

Kuala Lumpur – Malaysia, diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno. Pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN ini merupakan forum pertemuan antara pemimpin eksekutif dengan pemimpin legislatif negara-negara ASEAN.

Menurut Teguh, pada tanggal 26 April 2015, dilaksanakan AIPA Preparatory Meeting yang membahas masukan-masukan dari seluruh Delegasi negara-negara anggota AIPA terhadap Statemen Presiden AIPA/Ketua Parlemen Malaysia yang dibacakan pada Leaders Meeting tanggal 27 April 2015.

Indonesia memberikan beberapa usulan terutama yang menyangkut masalah politik-keamanan komunitas ASEAN dan mendorong agar Anggota ASEAN mampu memperkuat kerja sama di antara me-

reka utamanya pada kerjasama maritim dan kontra-terorisme.

Selain itu serta menyoroti pentingnya mendukung Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC) untuk mempromosikan integrasi intra-regional dengan memberikan prioritas untuk membangun infrastruktur fisik terutama pembangunan jalan, kereta api dan jalur air di ASEAN.

Adapun ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of AIPA yang berlangsung pada tanggal 27 April 2015 dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak.

Pada forum ini Presiden AIPA menyampaikan AIPA Message yang berisi, antara lain Pembentukan Komunitas ASEAN menegaskan kebutuhan untuk memperkuat komunitas regional yang berbasis aturan.

Rencana Aksi Menyeluruh ASEAN terhadap Kontra-Terrorisme, menjadi sebuah prioritas mendesak hal ini terkait dengan perkembangan situasi



keamanan global dengan munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

Selain itu, mendorong Negara-Negara Anggota ASEAN untuk berkomitmen dalam memberantas penyelundupan

manusia, obat terlarang, kejahatan dunia maya dan pencucian uang

Guna mencapai ASEAN sebagai sebuah komunitas yang inklusif dan berpusat pada masyarakat, AIPA men-

dukung upaya-upaya ASEAN dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, anak-anak dan manula. (mp,bksap) Foto: rizka/parle/od

DPR Siap Bahas Kembali RUU Tapera

Sebagai salah seorang inisiator RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), anggota DPR Yoseph Umar Hadi menyampaikan penghargaan kepada Badan Legislasi yang menerima usulan RUU ini dibahas dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

“Ini RUU pertama yang diterima oleh Baleg untuk diharmonisasikan. Harapkan kami seluruh anggota Dewan menyetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR kembali,” kata Yoseph kepada Parlemen, Senin (18/5) siang.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dari sisi naskah akademis maupun pokok-pokok persoalan dan isu-isu krusial telah diselesaikan DPR periode lalu. Dengan demikian, DPR sekarang tinggal membahas hal-hal yang belum selesai yakni 1 pasal yang masih pending. Dukungan yang diharapkan dari semua fraksi DPR dan pada masa sidang IV ini bisa dilanjutkan pembahasannya.

Bahkan, lanjut dia, Pimpinan DPR dalam pidato pembukaannya menyebutkan bahwa RUU yang saat ini dilakukan harmonisasi di Baleg adalah



Anggota DPR Yoseph Umar Hadi

RUU Tapera dan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) untuk segera diselesaikan dan disetujui sebagai RUU Usul DPR.

Yoseph mengakui, pembahasan RUU oleh DPR periode lalu hambatannya di pihak pemerintah yang tidak memiliki pendapat yang sama dengan DPR, tapi menjelang akhir periode DPR sudah sama. Hanya pemerintah tidak berani mengambil keputusan khusus-

nya Menkeu yang mengatakan akan berdampak kepada fiskal APBN.

“Tapi masalahnya bukan fiskal, melainkan kewajiban konstitusi bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan rumah bagi rakyat. Saya yakin dan optimis, RUU ini akan dapat dukungan paripurna DPR dan pemerintah diharapkan punya sikap yang sama sebab sangat pro rakyat,” tegasnya.

Ditanya apakah RUU ini sejalan dengan program pemerintah yang akan membangun jutaan rumah rakyat, mantan Pimpinan Pansus RUU Tapera ini mengatakan, sebenarnya kalau UU ini telah terbentuk DPR periode lalu pemerintah lebih ringan. “Punya legitimasi untuk menyelesaikan semua peraturan perundang-undangan bagaimana mengatasi deadlock perumahan,” ungkap dia.

Dia optimis RUU ini bisa diselesaikan tahun ini, apalagi telah masuk prolegnas. “Ini termasuk dari target 37 RUU tahun 2015, dan RUU Tapera paling siap untuk segera dibahas,” terang dia. (mp) Foto: naefuroji/parle/od

Deding Serap Aspirasi Mitra Kerja di Dapil

Selama masa reses berlangsung, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak akan mentradisikan untuk mengunjungi para mitra kerja di daerah pemilihan secara berkala. Potret mitra kerja perlu diketahui lebih dekat, agar bisa mengetahui peta masalah dan memberikan solusi secara konkrit.

Wakil rakyat dari Dapil Jabar III mengatakan hal tersebut dalam keterangan persnya yang diterima Parlemen, Senin (18/5). “Jadi, saya akan tradisikan untuk mengunjungi mitra-mitra kerja Komisi VIII di daerah

setiap masa reses,” kata Deding. Ia sendiri selama masa reses kemarin telah mengunjungi Kantor Kemenag, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur.

Ketiga instansi tersebut merupakan mitra kerja Komisi VIII. Politisi Partai Golkar tersebut, mengaku, sebagai Pimpinan Komisi VIII, ia tidak ingin hanya mendengar laporan kinerja dari Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Kepala BNPB, lebih dari itu, ingin mengetahui langsung persoalan-persoalan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

riil yang dihadapi di lapangan. Untuk itulah, dia melakukan kunjungan kerja secara maraton ke tiga instansi tersebut di Kabupaten Cianjur.

Banyak temuan yang ia ketahui selama reses berlangsung. Saat mengikuti rapat koordinasi dengan aparat Kemenag Cianjur, misalnya, Deding mendengar langsung keluhan soal belum dibayarnya sertifikasi guru honor non PNS Kemenag. Bahkan, Deding juga menerima pengaduan dari asosiasi pondok pesantren yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah. Deding berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri Agama.

“Hal-hal seperti ini sangat ironis terjadi. Sebab aparat Kemenag yang merupakan garda terdepan moralitas bangsa, justru diabaikan oleh pemerintah. Bagaimana mau melakukan revolusi mental apabila jajaran aparat yang merupakan garda moral bangsa justru tidak diperhatikan,” tandas Deding usai bertemu Kepala Kantor

Kemenag Cianjur Dadang Ramdani.

Keluhan yang sama diterima Deding saat melakukan audiensi dengan jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Di depan Kepala Dinas Sumitra, sejumlah anggota Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK) mengeluhkan nilai honor yang hanya Rp300 ribu per bulan. Bahkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) hanya diberi honor Rp100 ribu per bulan. Itu pun dirapel selama tiga bulan.

Mendengar realitas itu, Deding berjanji akan memperjuangkan besaran honor aparat Dinas Sosial ke Kemensos. “Yang penting kita harus bekerja secara ikhlas. Jika kita melakukan kerja sosial secara ikhlas, meskipun tidak mendapatkan penghargaan di dunia, tapi akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT,” ungkap Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini sembari memberikan bantuan pribadi

untuk menambah honor para pekerja sosial tersebut.

Di lain pihak, saat beraudiensi dengan jajaran BPBD Cianjur, kepala BPBD Asep Suheri melaporkan sejumlah bencana alam yang melanda kawasan Cianjur. Dengan dana yang terbatas, Asep mengaku sulit untuk berbuat banyak menolong para korban bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin ribut, sampai kebakaran. Bantuan dari pemerintah pusat pun sangat dibutuhkan.

Menerima keluhan itu, Deding menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif untuk meminta perhatian pusat dalam membantu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Apalagi Cianjur merupakan kawasan rawan bencana. “Insya Allah saya sudah mendapat komitmen dari Kepala BNPB untuk memperhatikan kawasan bencana di Cianjur,” tuturnya. (mh)

Foto: iwan armanias/parle/iw

Indonesia Harus Hindari Sanksi FIFA

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menyatakan prihatin terhadap situasi persepakbolaan tanah air terutama *kisruh* Menpora dan PSSI yang belum kunjung selesai. Memasuki Masa Sidang IV sekarang ini, Komisi X akan menggelar rapat intern untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ini.

“Kami tetap akan undang Menpora setelah PSSI dibekukan dan akhirnya kompetisi sepakbola dihentikan. Saya yakin PSSI akan kena sanksi FIFA jika hingga batas waktu 29 Mei mendatang belum ada penyelesaian. Kami akan usahakan jangan sampai FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Indonesia,” tegas Ridwan sebelum Rapat Paripurna DPR, Senin (18/5).

Ditegaskan politisi Golkar (Dapil Malang Raya) ini, sanksi FIFA harus dihindari. Pasalnya kalau sampai dijatuhi sanksi oleh FIFA tidak hanya PSSI yang rugi, tetapi rakyat Indonesia. Apalagi menghadapi even Sea Games, Asian Games dan kejuaraan sepak bola internasional, kita tidak boleh ikut dan dari luar tim-tim sepak bolanya tidak bisa masuk ke Indonesia.

“Matilah kita. Yang ada nanti hanya tarkam (sepak bola antar kampung saja),” ujar Ridwan menjelaskan. Organisasi FIFA memang unik, sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka, atau lahir tahun 1930. FIFA lebih dulu ada sebelum kita ada, sehingga selama aturannya tidak berentangan dengan konstitusi kita, maka aturannya juga harus diterima.

Untuk itu dia mendesak kita harus melakukan strategi lain bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia karena beberapa kali sudah digelar pertemuan baik PSSI, Deputi Kemenpora, namun kecenderungannya sulit kalau tidak dikenai sanksi.



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam

Intinya, ungkap Ridwan Hisyam, Komisi X siap melakukan mediasi atas *kisruhnya* Menpora dan PSSI. Salah satu fungsi Dewan adalah melakukan pengawasan baik terhadap kegiatan atau program Menpora maupun kebijakannya melalui forum RDPU PSSI yang akan kita undang.

“Hari ini Komisi X akan rapat menentukan jadwal. Setelah rapat paripurna, Komisi X akan rapat untuk menentukan agenda selama Masa Persidangan IV ini. Ada waktu sekitar sebulan sampai 18 Juni yang akan datang,” pungkaskan Ridwan. (mp) Foto: iwan armanias/parle/iw

Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan

Revitalisasi pasar tradisional di sejumlah daerah, memang, sudah mendesak dilakukan pemerintah. pasar tradisional tak boleh tersingkir oleh pasar-pasar modern. Infrastruktur menuju pasar tradisional juga perlu dibangun, agar masyarakat di daerah bisa mengakses pasar dengan baik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie (dapil Lampung I) kepada Parlemen, Kamis sore (21/5). Pernyataan Aroem itu menanggapi rencana pemerintah yang ingin merevitalisasi sekaligus membangun pasar tradisional, menyusul cairnya anggaran revitalisasi pasar sebesar Rp2 triliun dari APBN.

“Menurut saya revitalisasi pasar tradisional sudah mendesak, karena kalau tidak direvitalisasi akan semakin tersisih dan dijauhkan oleh masyarakat. Faktanya, pasar tradisional sudah ditinggalkan masyarakat karena ada ritel modern. Berkembangnya ritel modern yang tak terkendali membuat masyarakat beralih ke pasar-pasar modern,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Pasar modern, lanjut Aroem, selalu lebih unggul daripada pasar tradisional. Mereka memiliki gedung yang pamanen, kebersihan yang terjaga, dan mudah diakses. Bila pasar tradisional juga direvitalisasi atau dibangun seperti pasar modern, tentu semakin banyak masyarakat berkunjung.

Aroem menyebutkan, di Lampung sendiri banyak pasar tradisional yang perlu direvitalisasi. Kebutuhan itu sudah begitu mendesak dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Sementara mengomentari rencana pembangunan pasar tradisional di daerah-daerah perbatasan seperti di NTT dan Papua, Aroem menilai, penting pula dilakukan. Namun, pembangunannya harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, para petani dan nelayan bisa menjual produknya



Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie

ke pasar dengan akses jalan yang baik.

“Revitalisasi pasar-pasar tradisional di luar Jawa, apalagi di daerah yang minim infrastrukturnya, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi, membangun pasar itu jangan pasarnya saja, tapi harus didukung infrastrukturnya,” kata Aroem menutup perbincangan.

(mh) Foto: naefuroji/parle/od

Polri Perlu Ubah Metode Pembinaan Anggotanya



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

Polri harus merubah metode pembinaan dan pengawasan pada anggotanya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kepada Parlemen, Senin (18/5) menyusul terjadinya kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri.

“Kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri sebenarnya seperti anggota masyarakat lainnya, penyebabnya macam-macam, ada persoalan ekonomi atau masalah pribadi lainnya. Permasalahan lain muncul ketika polisi bunuh diri karena akan menimbulkan berita besar, sekaligus memunculkan image kurang baik di masyarakat, bahwasanya Polisi saja bisa bunuh diri apalagi masyarakat biasa,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, menurut Nasir perlu

pembinaan dan pengawasan yang serius dari pimpinan Polri kepada anggotanya. Sehingga jangan sampai urusan pribadi kemudian mengalahkan urusan negara, hingga akhirnya mereka nekat bunuh diri.

Ditambahkannya, seharusnya model pembinaan bagi anggota Polri ini seperti MLM (*multi level marketing*), dimana setiap pimpinan (atasan-red) Polisi memiliki anggota yang menjadi binaannya. Dimana anggota Polisi dapat mengutarakan berbagai permasalahannya kepada atasan atau pimpinannya. Sehingga keduanya dapat mencari solusi bersama atas permasalahan itu.

“Dengan pembinaan terarah dan terukur seperti itu akan membuat semuanya terkontrol hingga akhirnya segala permasalahan dapat ditemukan solusinya. Hingga kemudian kasus bunuh diri anggota polisi pun tidak akan terjadi lagi,” katanya. (Ayu) Foto:

iwan armanias/parle/iw

Anggaran Pilkada Serentak Meningkatkan

Semangat pilkada serentak adalah efisiensi dan efektivitas, namun menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) anggaran pilkada serentak justru meningkat tiga kali lipat daripada yang seharusnya terjadi.

Anggaran pilkada serentak membengkak menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria disebabkan, pertama, bahwa proses pilkada serentak memakan waktu yang lama dari pilkada sebelumnya. “Karena masa sengketa di Bawaslu, MK dan pengadilan itu masuk dalam tahapan pilkada, sehingga waktu pilkada lebih lama,” katanya.

Kemudian, yang kedua kata politisi Partai Gerindra ini disebabkan karena petugas di TPS bertambah. Dan yang ketiga, biaya sosialisasi dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini APBD. “Jadi tidak boleh lagi pasangan calon setelah ditetapkan membuat baliho-baliho yang tidak sesuai de-

ngan aturan dan mekanisme. sehingga beban-beban sosialisasi ke depan dalam rangka menjaga netralitas independensi, pemerataan dan keadilan itu dibebankan kepada negara. Inilah salah satu penyebab anggarannya menjadi lebih besar,” papar Riza.

Selain itu membengkaknya anggaran, tambah Riza, disebabkan oleh calon bertahan atau *incumbent* yang mencalonkan lagi umumnya memberikan anggaran yang cukup besar kepada KPU, sebaliknya yang terjadi bagi *incumbent* yang tidak mencalonkan, anggaran pilkada besarnya dibawah anggaran yang diusulkan oleh KPU sendiri.

“Untuk itu, kami (Komisi II DPR) telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membuat standar resasi anggaran pilkada. Al-



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria

hamdulillah sudah direspon Mendagri dan sudah disebar. Kita harapkan ini menjadi standar format dan ukuran bagi daerah-daerah, Pemda, DPRD dan KPU serta Bawaslu untuk menjadikan ini sebagai acuan dalam rangka menyusun anggaran,” jelasnya. (sc) Foto: naefurojil/parle/od

Pemerintah Harus Jamin Beras Palsu Tidak Masuk ke Indonesia



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

Isu seputar beras palsu asal Cina telah meresahkan masyarakat konsumen di Tanah Air. Tidak saja merusak harga pasar, lebih dari itu merusak kesehatan para konsumen. Kabarnya, beras ini terbuat dari ubi jalar, kentang, dan resin sintesis (plastik).

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (dapil Sumbar I) dalam keterangan persnya, mengimbau pemerintah untuk

betul-betul menjamin bahwa beras palsu asal Cina tersebut tidak masuk ke pasar Indonesia. “Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu,” tandas Hernanto.

Tidak hanya Indonesia, ungkap Hermanto, sejumlah negara juga sedang dihebohkan oleh beredarnya beras palsu itu. Di India, isu ini juga sudah meresahkan. Apalagi penjualan beras ini tidak bisa diprediksi dan diketahui secara pasti, karena bercampur dengan beras normal. Bila beras palsu ini sampai dikonsumsi masyarakat, dipastikan akan menimbulkan berbagai gejala penyakit. Dan yang jelas akan menimbulkan sakit perut.

Politisi F-PKS ini menyebutkan, kalangan masyarakat yang resah, telah meminta klarifikasi seputar hal ini. “Mereka butuh penjelasan dan langkah kongkrit pemerintah dalam mengantisipasi isu beras palsu,” ucapnya. Dan jaminan tersebut, lanjutnya,

tidak cukup diberikan dalam bentuk pernyataan, tapi juga aksi konkrit membendung masuknya beras palsu ke pasar nasional.

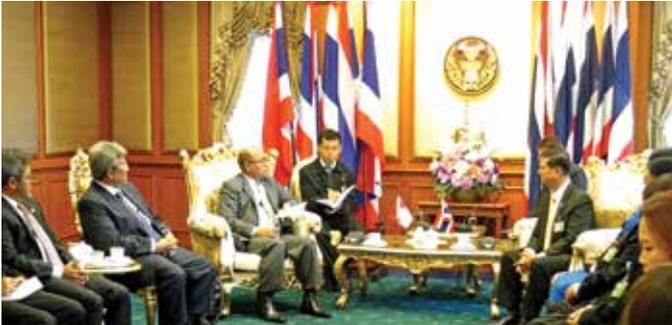
Menurutnya, pintu masuk beras plastik itu ada dua, bisa lewat kebijakan impor beras atau pasar gelap. “Dengan tidak melakukan impor beras, berarti secara tidak langsung telah menutup pintu legal bagi masuknya beras palsu itu ke Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh ia mendesak pemerintah agar tidak melakukan impor beras dan mendorong agar dalam mencukupi stok beras nasional menggunakan berbagai cara dengan menyerap beras atau gabah hasil panen petani.

“Substansi dari UU Pangan adalah kedaulatan pangan,” tegas legislator yang terlibat dalam pembahasan UU Pangan ini, seraya menambahkan, “Kedaulatan pangan itu adalah kita mengonsumsi apa yang kita produksi.”

(mh) Foto: iwan armanias/parle/iw

Radio dan TV Parlemen Thailand Telah Gelar Siaran Langsung



Deputi Perundang-undangan DPR, Johnson Rajagukguk saat berkunjung ke parlemen Thailand

TV Parlemen Thailand ternyata telah dapat menyiarkan langsung dan dilihat oleh seluruh masyarakat Thailand, sehingga kegiatan Dewan dapat terpublikasi dengan luas ke masyarakat. Hak siar TV Parlemen diatur dalam Undang-undang dibawah pengawasan Komisi Penyiaran atau semacam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Indonesia.

Demikian dijelaskan Sekjen Parlemen Thailand Charae Panpruang ketika menerima Delegasi Setjen DPR dipimpin Deputi Perundang-undangan, Johnson Rajagukguk 11-15 Mei lalu di Bangkok Thailand. Menurutnya, sistem digital

telah dipakai TV Parlemen Thailand dan sudah berlangsung 2 tahun, serta memiliki berbagai program siaran yang dimulai pukul 08.00 sampai pukul 24.00. Selain TV Parlemen, Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand memiliki siaran Radio Parlemen yang mengudara 24 jam.

Pegawai yang ada di Radio dan TV Parlemen berjumlah 130 orang, terdiri dari pegawai permanen dan non permanen (kontrak). Mereka meliput seluruh kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand.

Dijelaskan pula, pegawai TV Parlemen diberikan pelatihan (training) mengenai keparlemenan sebelum melakukan liputan di gedung parlemen. Fasilitas liputan yang ada di gedung parlemen Thailand, memang sudah memadai. Hampir di seluruh ruang rapat terdapat kamera robotic. Contohnya di ruang sidang Paripurna terdapat 8 (delapan) kamera TV Robotic. Didalam ruang sidang terdapat layar monitor LED besar, untuk menampilkan suasana sidang dan menampilkan anggota Dewan yang berbicara.

Dalam siarannya, Radio dan TV Parlemen menyajikan berbagai program acara, antara lain *talkshow*, proses pembentukan undang-undang di parlemen, liputan dari ruang sidang dan keterangan pers Pimpinan dan anggota Parlemen. (dd)

Kemajuan Setjen Parlemen Thailand Perlu Dicontoh

Sekretariat Jenderal DPR RI banyak mendapat masukan dan belajar dari Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand. Berbagai kemajuan telah banyak dilakukan oleh Sekretariat Parlemen Thailand, terutama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang telah dimilikinya.

“Banyak yang kita contoh dari Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand, baik dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasana yang sudah dimilikinya. Ini yang harus dicontoh oleh Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Deputi Perundang-undangan Setjen DPR, Johnson Rajagukguk di Bangkok saat memimpin Delegasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kunjungan studi banding Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan dari tanggal 11 – 15 Mei 2015 berlangsung cukup efektif. Delegasi diterima oleh Sekretaris Jenderal Parlemen Thailand, Charae Panpruang.

Selama berada di negara Gajah Putih tersebut, Delegasi mengadakan pertemuan dengan sejumlah divisi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Parlemen Thailand. Delegasi dipimpin Deputi Perundang-undangan, Johnson Rajagukguk, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned, Kepala Bagian Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Robert Juheng Purba, Kepala Bagian



Johnson Rajagukguk bertukar cinderamata

Pemberitaan, Dadang Prayitna, Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan Suratna dan dua orang *Legal Drafter*, Budi dan Umam.

Kepada Delegasi Setjen DPR, Charae Panpruang menjelaskan, jumlah pegawai permanen yang ada di Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand sebanyak 2000 pegawai ditambah 200 pegawai kontrak. Pegawai kontrak bekerja pada bidang yang terkait dengan TV dan Radio Parlemen dan bekerja di bidang kebersihan serta bidang lainnya.

Sebagai supporting system parlemen, Setjen Parlemen



Thailand selalu berupaya meningkatkan SDMnya diantaranya melakukan program pertukaran pegawai dengan parlemen Negara-negara sahabat. Selain untuk meningkatkan pengetahuan tentang parlemen negara-negara sahabat, mereka juga meningkatkan kemampuan berbahasa negara yang bersangkutan.

Terkait dengan keamanan gedung Parlemen Thailand, dilakukan oleh Polisi Parlemen yang merupakan pegawai Setjen Parlemen negara itu. Polisi Parlemen Thailand yang mengeluarkan ID Card bagi tamu-tamu yang berkunjung ke lingkungan Parlemen Thailand. Untuk keluar masuk tamu, Polisi Parlemen Thailand hanya membuka dua akses pintu masuk dan keluar. Kecuali jika ada acara nasional pintu akses dibuka lebih dari dua akses.

Keamanan di lingkungan Parlemen Thailand, menurut Charae, dilakukan secara professional. Mereka mendapatkan training pengenalan teknologi keamanan dan intelegen. Setiap tamu yang datang harus mengenakan ID Card yang dikeluarkan oleh Polisi Parlemen. Kecuali ID Card untuk wartawan, dikeluarkan oleh Humas Setjen Parlemen Thailand.

Sama halnya dengan pegawai parlemen, wartawan yang akan meliput di Parlemen Thailand, sebelumnya mendapat training mengenai keparlemenan. Wartawan yang meliput di Parlemen Thailand sebanyak 150 orang wartawan. Mereka disediakan ruang media center dengan fasilitas computer dan internet serta terdapat tempat khusus untuk konferensi pers. (dd)

DPR Minta Gorontalo Jadi *Pilot Project* KLA



Pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR dengan Wakil Gubernur Gorontalo

Dewan Perwakilan Rakyat berencana menjadikan Kabupaten Gorontalo menjadi *pilot project* Kota Layak Anak (KLA), sehingga diharapkan dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Apalagi, Kabupaten Gorontalo sudah berkali-kali mendapatkan predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian terungkap ketika Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR melaksanakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta jajaran, di Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (21/05/15).

“Kita berkeinginan menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai *pilot project* Kota Layak Anak. Kami melihat,

Gorontalo sudah layak untuk menjadi role model bagi daerah lain terkait KLA,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Fathan, usai pertemuan.

Politisi F-PKB ini berjanji untuk berdiskusi dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PP dan PA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar dapat memberikan perhatian yang serius dan lebih mendalam kepada Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo.

“Kita juga ingin, prestasi Kabupaten Gorontalo ini dapat menjadi kampanye bagi daerah lain untuk Kota Layak Anak. Banyak hal yang dilakukan Gorontalo ini juga dapat dilakukan oleh daerah-daerah lain, seperti 1 desa 1 PAUD, dan

pembelajaran anak,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah II ini.

Fathan menegaskan, saat ini Indonesia krisis dalam kekerasan anak, sehingga hasil temuan di Gorontalo ini dapat memberikan masukan kepada Komisi VIII untuk mencari solusi dan preventif, agar kekerasan anak dapat diminimalisir.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII Samsu Niang (F-PDI Perjuangan). Ia menilai, di beberapa daerah lain masih rentan terhadap kekerasan anak, sehingga, konsep-konsep KLA di Kabupaten Gorontalo ini dapat diterapkan di daerah lain.

“Kami berharap, temuan ini dapat menjadi masukan bagi Komisi VIII untuk menciptakan Indonesia merupakan negara yang ramah anak, dan tidak ada kekerasan anak,” harap Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan II ini.

Apresiasi kepada Kabupaten Gorontalo yang mendapat predikat KLA hingga 4 kali ini pun diberikan oleh Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wulandari (F-PD). Politisi asal Dapil DKI Jakarta I ini juga berharap Kabupaten Gorontalo dapat menjadi *pilot project* KLA bagi daerah-daerah lain.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VIII Andadan Ruskati Ali Baal mewakili F-Gerindra, Kuswiyanto (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), Muslich (F-PPP) dan Trimurny (F-Nasdem). (sf) foto: sofyon/parle/od



Pertemuan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Duta Besar Rusia Mikhail Yurievich Galuzin membicarakan peningkatan kerjasama antara Rusia dan Indonesia, Jumat (22/5).
Foto: Denus/parle/



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon dan Ketua Baleg Sareh Wiyono Menerima Centre For Indonesian Communities Studies (CICS), Kaukus Raden Saleh, dan YKCB Tentang Penolakan RUU KKR, Kamis (21/05) Foto:Naefuroji/parle



Anggota Komisi VI DPR RI berfoto bersama DPP Serikat Pekerja PLN usai beraudiensi mengenai Buruh Outsourcing di PLN, Kamis (21/5). Foto: Naefuroji/Parle/OD



KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta menggelar aksi donor darah dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).
Foto: Andri/parle/ray



Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan membicarakan tindak lanjut kunjungan kerja ke berbagai daerah pada Masa Reses III Tahun Sidang 2014-2015 dilanjutkan pembicaraan tentang pembangunan tol laut. Rabu (20/5). Foto: Ray/Parle

